



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

KPKNL JAYAPURA

# 2024



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A.    GAMBARAN UMUM KPKNL JAYAPURA .....	5
B.    ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KPKNL JAYAPURA.....	9
1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura .....	9
2. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issues</i> ) KPKNL Jayapura .....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	15
A.    Rencana Strategis KPKNL Jayapura .....	15
B.    Kontrak Kinerja KPKNL Jayapura .....	17
C. <i>Addendum</i> Kontrak Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A.    Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B.    Kinerja Lainnya.....	69
C.    Realisasi Penggunaan Anggaran DIPA tahun 2024.....	70
BAB IV PENUTUP .....	72

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura yang terdiri atas Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024, Pengukuran Kinerja tahun 2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2024 dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan oleh KPKNL Jayapura dan sebagai perwujudan atas kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk menyusun rencana strategisnya masing-masing dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah agar tercapai penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022, setiap instansi pemerintah harus membuat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pertanggungjawaban atas pelaporan keuangan pada KPKNL Jayapura disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN KPKNL Jayapura Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target yang dibebankan kepada KPKNL Jayapura selama tahun 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dalam rangka menuju terwujudnya *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih

meningkatkan kinerja KPKNL Jayapura dalam waktu yang akan datang. Di samping itu, berfungsi pula sebagai *input* bagi kantor pusat dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga memuat laporan pencapaian kinerja tahun 2024, serta menceritakan keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2024. Adapun keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2024 itu akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

LAKIN tahun 2024 KPKNL Jayapura dapat disusun atas dukungan dan kerjasama seluruh pegawai KPKNL Jayapura. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIN KPKNL Jayapura.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

Jayapura, 18 Februari 2025

Kepala KPKNL Jayapura



Ditandatangani secara elektronik  
Daniel H.P. Panggabean

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri atas: Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, Pengukuran Kinerja Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

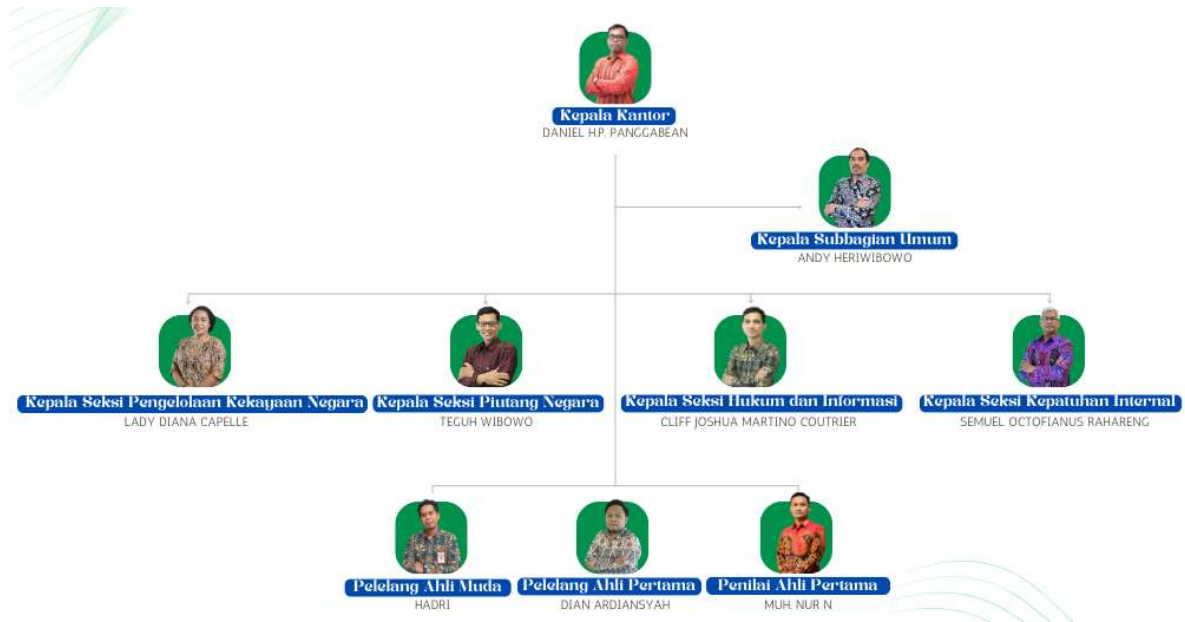
Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini bertujuan agar KPKNL Jayapura dapat mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2024 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Berikut ini merupakan gambaran umum serta aspek strategis dan permasalahan KPKNL Jayapura.

#### **A. GAMBARAN UMUM KPKNL JAYAPURA**

KPKNL Jayapura adalah suatu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Jayapura terdiri atas 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), 5 eselon IV.a (Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum) dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a) Subbagian Umum, mempunyai melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c) Seksi Piutang Negara, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d) Seksi Hukum dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- e) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian *intern*, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura saat ini dapat dilihat pada Bagan berikut:



KPKNL Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja seluas 392 kali luas Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang terdiri atas 1 (satu) kota dan 19 kabupaten yang mencakup 4 provinsi sebagai berikut:

Provinsi Papua	Provinsi Papua Pegunungan
1. Kota Jayapura	10. Kabupaten Jayawijaya
2. Kabupaten Jayapura	11. Kabupaten Pegunungan Bintang
3. Kabupaten Keerom	12. Kabupaten Mamberamo Tengah
4. Kabupaten Sarmi	13. Kabupaten Nduga
5. Kabupaten Mamberamo Raya	14. Kabupaten Yalimo
	15. Kabupaten Yahukimo
	16. Kabupaten Tolikara
	17. Kabupaten Lanny Jaya
Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua Tengah
6. Kabupaten Merauke	18. Kabupaten Mimika
7. Kabupaten Asmat	19. Kabupaten Puncak
8. Kabupaten Mappi	20. Kabupaten Puncak Jaya
9. Kabupaten Boven Digoel	

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Jayapura menyelenggarakan fungsi yaitu:

- Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan

kekayaan negara;

- c) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d) Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- h) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j) Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
- k) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Jayapura sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu:

## B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KPKNL JAYAPURA

### 1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura

Aspek strategis KPKNL Jayapura terbagi dalam dua hal yaitu: aspek secara internal dan eksternal yaitu:

#### a. Aspek secara internal

1. Secara hukum KPKNL Jayapura memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Memiliki sumber daya manusia yang sesuai di bidangnya dan sarana prasarana yang cukup memadai. Adapun jumlah pegawai yang ada di lingkungan KPKNL Jayapura tahun 2024 berjumlah 21 pegawai dengan komposisi sebagaimana Tabel berikut:

#### 1) Berdasarkan Golongan

**Tabel I**  
**Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura**  
**Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai
1.	I	-	-	-
2.	II	11 orang	1 orang	12 orang
3.	III	7 orang	2 orang	9 orang
4.	IV	1 orang	-	1 orang
<b>TOTAL</b>		<b>19 orang</b>	<b>3 orang</b>	<b>22 orang</b>

Berdasarkan hasil pemetaan dari golongan, KPKNL Jayapura mempunyai total pegawai sebanyak 22 orang, yang terdiri atas 19 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Golongan II merupakan golongan terbanyak di KPKNL Jayapura yaitu 12 orang diikuti 9 orang golongan III dan 1 orang golongan IV.

## 2) Berdasarkan Pendidikan

**Tabel II**  
**Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Orang
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	-	-	-	-
2.	DI	-	3 orang	-	-	3 orang
3.	DIII	-	9 orang	-	-	9 orang
4.	S1	-	-	6 orang	-	6 orang
5.	S2	-	-	3 orang	1 orang	4 orang
<b>TOTAL</b>		-	<b>12 orang</b>	<b>9 orang</b>	<b>1 orang</b>	<b>22 orang</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan, KPKNL Jayapura memiliki beragam tingkat pendidikan dari tingkat SLTA sampai ke tingkat pendidikan paling tinggi yaitu strata 2. Dari segi tingkat pendidikan KPKNL Jayapura mempunyai 4 (empat) orang yang berasal dari strata 2, 6 (enam) orang yang berasal dari strata 1, kemudian 9 (sembilan) orang dari diploma III, dan 3 (tiga) orang dari diploma I. Beragamnya jenis tingkat pendidikan di KPKNL Jayapura tidak menutup kemungkinan setiap pegawai untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai satu dengan pegawai lainnya.

## 3) Berdasarkan Umur dan Golongan

**Tabel III**  
**Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Umur dan Golongan**

Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	12	-	-	12
31-40	-	-	5	-	5
41-50	-	-	2	1	3
>50	-	-	2	-	2
<b>Total</b>	-	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>22</b>

#### 4) Berdasarkan Jabatan Tenaga Fungsional

**Tabel IV**  
**Jumlah Jabatan Tenaga Fungsional**

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1	Pejabat Lelang	2
2	Fungsional Penilai Pemerintah	1
	Total	3

KPKNL Jayapura mempunyai 3 orang yang memegang jabatan fungsional, adapun jabatan fungsional itu antara lain: Jabatan Fungsional Pelelang 2 (dua) orang dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 1 (satu) orang.

Adapun dalam kegiatan operasionalnya KPKNL Jayapura beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jalan Ahmad Yani Nomor 8, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura guna kelancaran tugas KPKNL Jayapura juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- Kendaraan operasional sebanyak 12 unit yang terdiri atas 6 unit mobil dan 6 unit sepeda motor.
  - Personal Komputer sebanyak 11 unit dan laptop sebanyak 28 unit.
  - Ruang kerja dan rapat yang ber-AC.
  - Serta sarana penunjang lainnya.
3. KPKNL Jayapura mempunyai peran strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, KPKNL Jayapura telah melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan yang optimal dan profesional yaitu melalui upaya yang telah dilakukan dengan membangun citra organisasi yang baik, penataan ruang pelayanan, penambahan ruang untuk pertemuan dan pembinaan, sarana kerja yang mendukung kelancaran kerja, peningkatan kenyamanan ruang kerja, dan penataan atau penertiban kembali administrasi laporan untuk masing-masing seksi. KPKNL Jayapura dengan didukung oleh sumber daya yang ada senantiasa berusaha untuk

memanfaatkan peluang dalam wilayah kerjanya untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan negara bukan pajak. Adapun peluang-peluang tersebut dapat berupa dari penggalan potensi lelang, pengurusan piutang negara, dan pengelolaan kekayaan negara. Dari segi lelang terlihat adanya peluang untuk lelang barang sitaan, temuan, rampasan dan penghapusan yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan dari pengurusan piutang negara potensi penerimaan negara berasal dari penyelesaian piutang yang masih didukung oleh barang jaminan.

#### **b. Aspek Strategis Secara Eksternal**

1. Aspek geografi yaitu wilayah kerja KPKNL Jayapura yang sangat luas 392 kali wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dengan 523 satker tersebar meliputi 1 kota dan 19 kabupaten di wilayah Papua.
2. Wilayah kerja yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu dari hasil hutan, tambang, perkebunan maupun pertanian.

## **2. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) KPKNL Jayapura**

Dalam mewujudkan tujuan-tujuannya KPKNL Jayapura mempunyai visi yang sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu: "Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ", merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jayapura menetapkan misi, yang terdiri atas:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel;

6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Jadi dapat diketahui bahwa tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.

Adapun untuk mendukung visi dan misi tersebut, KPKNL Jayapura mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan penerimaan negara melalui pengurusan piutang negara dan lelang serta mengoptimalkan administrasi pengurusan piutang negara dan lelang (PPNL).
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.
3. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik negara.
4. Peningkatan pelayanan penilaian.
5. Peningkatan pelayanan lelang.

Tujuan tersebut harus dapat dicapai sesuai yang diharapkan pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KPKNL Jayapura dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (satu tahun). Sasaran KPKNL Jayapura tersebut meliputi: **“Tercapainya Target Penerimaan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Terwujudnya penggunaan Layanan yang Tinggi dan Terwujudnya Pengurusan Kekayaan Negara yang Optimal”**. Maka dari itu antara tujuan dan sasaran harus sejalan agar misi yang telah ditetapkan dapat berhasil dan berjalan dengan baik sesuai harapan.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan utama yang harus dihadapi yaitu:

1. Tidak sebandingnya beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat dilihat pada Tabel I, II dan III dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada, tidak sebanding dengan luas wilayah kerja yang ada, yang mana hampir meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang luasnya 392 kali luas Provinsi Daerah Khusus Jakarta. KPKNL Jayapura yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 22

pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari diploma I hingga strata 2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura.

2. Kondisi geografis yang meliputi cakupan wilayah kerja yang sangat luas juga merupakan tantangan tersendiri terutama mencakup mobilisasi semua harus menggunakan pesawat dengan biaya yang mahal.
3. Daya beli masyarakat terhadap minat lelang masih rendah.
4. Permasalahan tanah hak ulayat yang masih dominan di wilayah Papua.
5. Sarana jaringan telekomunikasi yang belum memadai.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis KPKNL Jayapura

Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu kementerian/lembaga negara yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan laporan kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah rencana strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, KPKNL Jayapura tetap mengacu pada visi yang telah ditetapkan yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam Rangka Mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”**.

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Jayapura memiliki 5 (lima) misi, yaitu:

1. mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;

5. mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai tugas dan fungsi maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
  - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
  - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;

- d. Komunikasi publik yang efektif.

## B. Kontrak Kinerja KPKNL Jayapura

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, KPKNL Jayapura menetapkan sasaran strategis (SS) beserta indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai. Pada tahun 2024 KPKNL Jayapura menetapkan 11 SS dengan 19 IKU yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian SS dan IKU KPKNL Jayapura akan diuraikan pada tabel dibawah ini, yang mana meliputi target 2024.

**Tabel V**  
**Penetapan Kinerja KPKNL Jayapura Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2024
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		Indeks integritas	89,17
2.	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	71,5%
		Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5%
3.	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%
4.	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75
5.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipkatkan	100%
		Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>idle</i>	100%
6.	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	0%
		Persentase produktivitas lelang	89%
7.	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	100%
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%

10.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82

### C. Addendum Kontrak Kinerja

Pada kontrak kinerja KPKNL Jayapura tahun 2024 di atas telah disesuaikan dengan *addendum* sebagai berikut.

#### 1. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target	
5.	Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif	-	-	-	5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>idle</i>	100
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

#### 2. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum								
Kode Iku	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4
<b>1b-CP</b>	Indeks integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
<b>2a-CP</b>	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
<b>2b-CP</b>	Tingkat efektifitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5
<b>5a-CP</b>	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8a-N</b>	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
<b>9aCP</b>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>11a-N</b>	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Menjadi								
Kode Iku	Indikator kinerja individu	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4
<b>1b-CP</b>	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
<b>2a-CP</b>	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
<b>2b-CP</b>	Tingkat efektifitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	10	45	45	-	45	86,5	86,5
<b>5a-CP</b>	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
<b>5c-N</b>	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>idle</i>	25	55	55	88	88	100	100
<b>8a-N</b>	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	45	60	60	75	75	90	90
<b>9aCP</b>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>11a-N</b>	Indeks efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

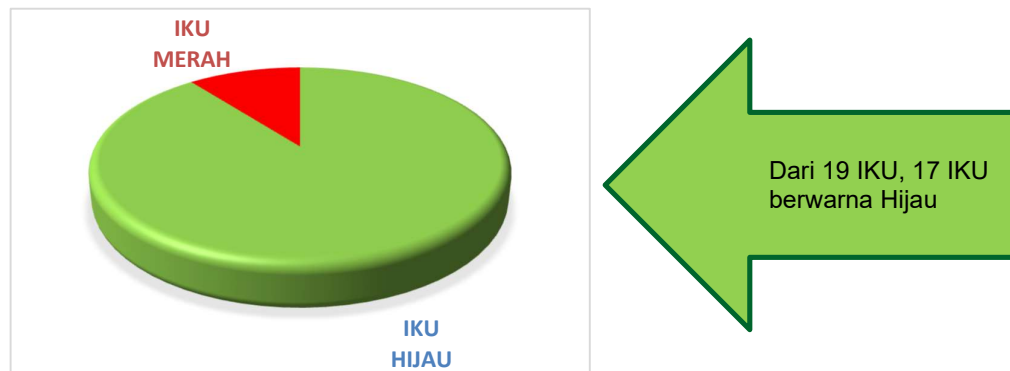
#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu kepada *Strategy Map* Kemenkeu *Three* KPKNL Tahun 2024 yang mana dituangkan dalam sebuah perjanjian kontrak kinerja antara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dengan KPKNL. Dari hasil perjanjian kontrak kinerja tersebut, didapat 11 butir sasaran strategis (SS) dan 19 butir indikator kinerja utama (IKU).

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian nilai kinerja organisasi (NKO) KPKNL Jayapura adalah sebesar 108,85%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024			
1	27,95%	2	21,59%
	Stakeholder (30%)		Customer (20%)
3	30,00%	4	29,31%
	Internal Process (25%)		Learning and Growth (25%)
<b>NKO</b>		<b>108,85%</b>	

Selama tahun 2024, KPKNL Jayapura memiliki capaian 17 IKU berstatus hijau.



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**1. Sasaran strategis 1: pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, DJKN mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	78,92%	78,92%
2	Indeks integritas	89,17	92,44	103,67%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

**1) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang**

Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang terinci menjadi beberapa bagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu PNBP aset/BMN, PNBP lelang, dan PNBP piutang negara (biaya administrasi). Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut:

DJKN	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/
Realisasi	13,0%	22,9%	22,9%	52,6%	52,6%	78,9%	78,9%	TLK
Capaian	13,0%	22,9%	22,9%	52,6%	52,6%	78,9%	78,9%	
Nilai Kinerja	13	22,9	22,9	52,6	52,6	78,9	78,9	

Adapun capaian IKU ini adalah  $\Sigma$  (realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara/target penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara) x 100% = 78,9%. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang memiliki target dan realisasi setiap triwulan sebagai berikut.

IKU	TARGET Q4	TARGET Q3	TARGET Q2	TARGET Q1
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	22.041.813.902	15.426.541.600	6.619.946.400	22.041.813.902
<b>PNBP BMN</b>	11.731.488.000	8.212.041.600	3.519.446.400	11.731.488.000
<b>PNBP PN</b>	75.325.902	50.000.000	30.000.000	75.325.902
<b>PNBP Lelang</b>	10.235.000.000	7.164.500.000	3.070.500.000	10.235.000.000
1a-CP	Realisasi Q4	Realisasi Q3	Realisasi Q2	Realisasi Q1
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	17.395.908.754	9.155.582.334	5.051.673.600	3.390.289.863
<b>PNBP BMN</b>	12.478.577.243	6.588.398.483	3.864.068.692	2.859.602.047
<b>PNBP PN</b>	55.845.389	41.820.361	27.639.796	13.628.988
<b>PNBP Lelang</b>	4.861.486.122	2.525.363.490	1.159.965.112	517.058.828

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (renstra kementerian keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%		100%	100%		78,92%
2023	100%		100%	100%		95,63%
2022	100%		100%	100%		162,66%
2021	100%		100%	100%		151,30%
2020	100%		100%			103,27%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara perjanjian kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya.

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Melakukan penggalan potensi melalui wasdal atas lahan yang masih dapat dioptimalkan untuk pelaksanaan pemanfaatan
- b. Melakukan penggalan potensi melalui wasdal atas BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat namun belum dilakukan pengajuan penghapusan/pemindahtanganan melalui lelang
- c. Melakukan penggalan potensi PNBFP Fungsional pada satuan kerja BLU dan Bandara yang terkait dengan penggunaan/pemanfaatan aset
- d. Rapat pembahasan lelang barang rampasan
- e. Membuat *MOU* dengan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan akan diikuti dengan pemerintah kabupaten lainnya
- f. Proses percepatan SKPT melalui akun mitra BPN
- g. Menyelenggarakan bincang lelang
- h. Melaksanakan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang
- i. Proses percepatan SKPT melalui akun mitra BPN
- j. Monitoring angsuran dari para debitur
- k. Komunikasi dan negosiasi dengan para debitur

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut.

- a. Capaian Pegadaian masih rendah
- b. Lelang BMD belum optimal, terhambat birokrasi dan lambatnya proses permohonan penilaian dan lelang
- c. Lelang Kejaksaan belum optimal karena terhambat proses penilaian dan tidak

lengkapnya dokumen persyaratan (putusan pengadilan)

- d. Permasalahan SKPT untuk lelang UUHT
- e. BMN yang kondisi rusak berat di satker belum diajukan penjualan ke KPKNL
- f. Satker belum aware untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal
- g. Target PNBPN terus mengalami peningkatan setiap tahun, dan penyumbang PNBPN tertinggi bersumber dari PNBPN atas sewa BMN, namun umumnya sewa dalam jangka waktu di atas 1 tahun sehingga bukan merupakan PNBPN rutin
- h. IKU PNBPN aset memiliki kendali rendah atas pencapaian dari KPKNL, sehingga keterlibatan dan kepatuhan satuan kerja sangat dibutuhkan
- i. Rendahnya kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran/penyelesaian piutang negara
- j. Jumlah BKPN aktif relatif sedikit (2 BKPN)

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a. Sosialisasi dan penggalan potensi pengurusan piutang negara
- b. Peningkatan upaya penagihan terhadap debitur
- c. Pengurusan piutang negara hasil penyerahan baru
- d. Penggalan potensi pada K/L, Pemda, dan lembaga *sui generis*
- e. Penggalan potensi lelang
- f. Bersurat ke satuan kerja yang belum melakukan tindak lanjut persetujuan
- g. Wasdal ke satker untuk potensi sewa dan penjualan
- h. Terus melakukan penggalan potensi atas PNBPN aset, baik dari optimalisasi pemanfaatan aset, penjualan BMN rusak berat, maupun pendekatan pada barang-barang rampasan
- i. Melakukan monitoring secara rutin terhadap satuan kerja khususnya yang perlu melakukan tindak lanjut atas sewa dan penjualan BMN

## 2) Indeks integritas

IKU indeks integritas KPKNL Jayapura tercapai dengan rincian sebagai berikut.

DJKN	2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							Pol/KP
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	
Target	10	20	20	30	30	89.17	89.17	Max/
Realisasi	10	20	20	30	30	92,44	92,44	TLK
Capaian	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	103,7%	103,7%	
Nilai Kinerja	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	103,7%	103,7%	

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89,17	-	-	-	-	103,7
2023	88,67	91.5	91.5	91	-	89,17
2022	88,17	91	91	91	-	90,88
2021	87,67	90.5	90.5	90,5	-	93,15
2020	87,17	90	90	-	-	92,52

Sumber: Data Olahan

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara perjanjian kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk standar nasional, tidak ada standar narasi.

Target IKU indeks integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, melakukan *update* pengendalian gratifikasi di aplikasi *siaga.kemenkeu*, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya, dan melakukan langkah mitigasi terkait gratifikasi dan pemantauan titik rawan gratifikasi.

Namun masih ditemukan kendala yang perlu mendapat perhatian yaitu lingkup IKU indeks integritas yang tidak hanya pada KPKNL Jayapura saja, tetapi seluruh wilayah Indonesia.

## 2. Sasaran strategis 2: pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	71,5	87,23	122%
2	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5	98,5	114%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

### 1) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan

IKU ini merupakan memiliki penjelasan sebagai berikut. Standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) barang milik negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat kesesuaian penggunaan barang milik negara (BMN) sesuai standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Formula dalam perhitungan IKU SBSK sebagai berikut.

<b>Formula Pengukuran Untuk Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan</b>	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$
n =	jumlah nup per jenis objek per Kanwil DJKN (untuk di Kanwil DJKN) / per KPKNL (untuk di KPKNL)
x =	rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per Kanwil DJKN (untuk di Kanwil DJKN) / per KPKNL (untuk di KPKNL)
<b>Formula Optimalisasi Untuk NUP/Objek BMN Yang Telah Diukur Tingkat Kesesuaiannya pada Pelaksanaan Sebelumnya</b>	
Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$
n =	jumlah nup per jenis objek yang telah diukur pada pelaksanaan sebelumnya per Kanwil DJKN (untuk di Kanwil DJKN) / per KPKNL (untuk di KPKNL)
x =	rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek yang telah diukur pada pelaksanaan sebelumnya per Kanwil DJKN (untuk di Kanwil DJKN) / per KPKNL (untuk di KPKNL)

Adapun *trajectory* IKU persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

DJKN	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30	50	30	60	60	71,5	71,5	Max/
Realisasi	80,43	77,05	77,05	96,72	96,72	98,50	98,50	TLK
Capaian	268,1%	154,1%	256,8%	161,2%	161,2%	137,8%	137,8%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	72%	70%	70%	70%		87,23%
2023		65%	65%	65%		76,10%
2022	65%	60%	60%	60%		71,57%
2021	62%	57%	57%	57%		69,55%
2020	100%	55%	55%			101,11%

Target IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan

standar kebutuhan berhasil dicapai dengan baik dengan adanya koordinasi dengan seluruh satker terkait aset-aset yang menjadi target pendataan dan perhitungan tingkat kesesuaian standar barang dan standar kebutuhan

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut.

- a) Masih terdapat beberapa aset yang saat ini kodefikasi aset dan kegunaan berbeda
- b) Masih terdapat aset-aset yang tidak diketahui asetnya yang mana.
- c) Beberapa satuan kerja tidak mengetahui seluruh aset yang dimiliki
- d) Kurangnya pemahaman satker mengenai SBSK dan seberapa pentingnya SBSK, sehingga SBSK tidak dianggap sebagai suatu prioritas

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a) Memberikan sosialisasi mengenai SBSK dan seberapa pentingnya SBSK
- b) Membantu melakukan inventarisasi aset dari masing-masing satuan kerja
- c) Membantu dalam pengarahan untuk mereklasifikasi aset supaya sesuai dengan kegunaan

#### **1) Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN**

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (wasdal) pengelolaan BMN merupakan bagian dari wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

IKU tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN pada 2024 memiliki capaian 113,9% dengan rincian *trajectory* sebagai berikut.

DJKN	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2b-CP Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan bmn							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	45	45	60	60	86,5	86,5	Max/
Realisasi	80,43	77,05	77,05	96,72	96,72	98,50	98,50	TLK
Capaian	804,3%	171,2%	171,2%	161,2%	161,2%	113,9%	113,9%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	113,9	113,9	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	87%		80%	80%		98,50%
2023	86%		80%	80%		100,00%
2022	85%		75%	80%		105,17%
2021	85%		75%			88,52%
2020	80%		70%			-

Target IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Melakukan monitoring secara rutin terkait pelaksanaan tindak lanjut pengelolaan BMN
- b) Membuat database atas pengelolaan BMN dan pelaksanaan tindak lanjutnya

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut.

- a) Terdapat satuan kerja yang tidak langsung menindaklanjuti penjualan BMN secara lelang dengan berbagai alasan.
- b) Terdapat persetujuan atas sewa yang masih perlu dilakukan negosiasi dengan calon penyewa sehingga tidak langsung dilakukan penyetoran sewa dan perjanjian sewa

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a) Sejak surat persetujuan diterbitkan, atas satuan kerja tersebut langsung diminta untuk melaksanakan tindak lanjut atas persetujuan yang telah diberikan
- b) Direncanakan akan dilakukan inovasi integrasi layanan untuk menghindari adanya persetujuan yang tidak ditindaklanjuti

### **3. Sasaran strategis 3: pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang. Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: 1) seluruh BMN, KNL, dan KND telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya; dan 2) pengelolaan BMN, KNL, KND, piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektifitas, efisiensi, dan penerimaan negara. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang

mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100%	53,71%	53,71%
2	3b-CP Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%	174,75%	174,75%

Rincian IKU dari sasaran strategis ini sebagai berikut.

### 1) Persentase realisasi pokok lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pejabat lelang (PL) kelas I/JF pelelang dan pejabat lelang (PL) kelas II dalam periode tertentu.

IKU persentase realisasi pokok lelang ini memperhitungkan (jumlah realisasi pokok lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian)/(target pokok lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + pokok lelang PL II). IKU ini bertujuan agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. Adapun *trajectory* IKU persentase realisasi pokok lelang tahun 2024 adalah sebagai berikut.

DJKN	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal							
	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/
Realisasi	4,81	10,81	10,81	20,79	20,79	53,71	53,71	TLK
Capaian	4,8%	10,8%	10,8%	20,8%	20,8%	53,7%	53,7%	
Nilai Kinerja	4,8	10,8	10,8	20,8	20,8	53,7	53,7	

Target jumlah pokok lelang pada tahun 2024 pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp326.670.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp175.469.009.590,00

Uraian terhadap capaian pokok lelang secara nasional sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Pokok Lelang PL Kelas I/JF Pelelang	Rp49.500.000.000,00	Rp63.514.029.690,00	128,31%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp277.170.000.000,00	Rp111.954.979.900,00	40,39%
<b>Jumlah Pokok Lelang</b>	<b>Rp326.670.000.000,00</b>	<b>Rp175.469.009.590,00</b>	<b>53,71%</b>

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian

kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%		100%	100%		53,71%
2023	100%		100%	100%		83,06%
2022	100%		100%	100%		200,80%
2021	100%		100%	100%		168,02%
2020	100%		100%	100%		84,71%

Sejalan dengan ketercapaian IKU persentase realisasi pokok lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa monitoring dan evaluasi baik atas pelaksanaan pelayanan lelang dalam rangka menunjang *continues improvement*.

Target IKU persentase realisasi pokok lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) *MoU* dan koordinasi intensif dengan *stakeholder* lelang;
- b) Penggalian potensi Lelang;
- c) Rapat pembahanan lelang barang rampasan bersama Kejaksaan Negeri Jayapura, Kejaksaan Tinggi Papua, Oditurat Militer, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua;
- d) Proses percepatan SKPT *online* melalui akun mitra BPN; dan
- e) Pelaksanaan kedai lelang tahun 2024.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

- a) capaian lelang pengadaan di wilayah kerja KPKNL Jayapura masih belum optimal dan masih terjadi *gap* antara realisasi dan target 2024;
- b) Lelang BMD belum optimal, terhambat birokrasi dan lambatnya proses permohonan penilaian dan Lelang;
- c) Lelang kejaksaan belum optimal karena terhambat proses penilaian dan tidak lengkapnya dokumen persyaratan (putusan pengadilan); dan
- d) Permasalahan SKPT untuk lelang UUHT

Mitigasi risiko yang disusun dalam proses pencapaian IKU ini yaitu Penggalan potensi Lelang. Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang antara lain:

- a) Monev bersama perbankan di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura;
- b) Koordinasi penyelesaian barang rampasan;
- c) Penggalan potensi lelang; dan
- d) Koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua menindaklanjuti hasil audit aset pemerintah daerah.

## 2) **Persentase penurunan *outstanding* piutang negara**

Persentase jumlah penurunan *outstanding* piutang negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- a) PNDS/piutang negara dapat disetor (angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- b) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- c) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- d) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- e) Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
- f) Koreksi data (perbaikan pencatatan/nilai).

Adapun *trajectory* IKU persentase penurunan *outstanding* piutang negara tahun 2024 adalah sebagai berikut.

DJKN	Pengelolaan piutang negara dan lelang yang optimal							Pol/KP
	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/
Realisasi	8,31	14,72	14,72	29,88	29,88	174,75	174,75	TLK
Capaian	8,3%	14,7%	14,7%	29,9%	29,9%	174,8%	174,8%	
Nilai Kinerja	8,3	14,7	14,7	29,9	29,9	120	120	

Capaian penurunan *outstanding* piutang negara pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.821.933.023,00 dari target Rp2.187.062.437,00.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%			100%		174,75%
2023	100%			100%		130,00%
2022	100%					164%
2021	100%					100,68%
2020	5%					56,12%

Sejalan dengan ketercapaian IKU persentase penurunan *outstanding* piutang

negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan berupa koordinasi intens dengan penyerah piutang terbesar membahas solusi penyelesaian piutang yang diurus PUPN.

Target IKU persentase penurunan *outstanding* piutang negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Pelaksanaan penagihan secara langsung;
- b) Negosiasi pembayaran dengan para penanggung hutang;
- c) Monitoring angsuran debitur;
- d) Sosialisasi dan koordinasi terkait program keringanan utang.
- e) Mengangkat juru sita sejumlah 2 orang pada November 2024.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

- a) Jumlah berkas kasus piutang negara dan saldo *outstanding* piutang negara yang relatif sedikit;
- b) Keterbatasan kemampuan para penanggung hutang dalam melakukan pembayaran;
- c) Kurang kooperatifnya para penanggung hutang untuk melakukan pembayaran

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain:

- a) Pelaksanaan penagihan secara langsung;
- b) Monitoring angsuran penanggung utang;
- c) Sosialisasi dan penggalan potensi pengurusan piutang negara;
- d) Penerbitan surat penerimaan pengurusan piutang negara baru; dan
- e) Peningkatan upaya penagihan terhadap penanggung hutang.

#### **4. Sasaran strategis 4: layanan penilaian yang *agile*, efektif, dan efisien**

Nilai kekayaan negara yang akuntabel adalah nilai kekayaan negara yang dapat dipertanggungjawabkan, dipahami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan secara maksimal untuk pengambilan keputusan. Nilai yang dihasilkan diharapkan memenuhi kriteria akuntabel di dalam proses operasionalnya sehingga pihak internal dan pihak eksternal dapat menilai dan melihat kinerja organisasi tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	102	136,30%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon. Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan dimulainya pengumpulan data dan informasi.

Formula Perhitungan :	
1. Rata-rata indeks penyelesaian penilaian KPKNL=	$\frac{\text{Indeks pelaksanaan penilaian per laporan penilaian}}{\text{Jumlah laporan penilaian}} \times \text{Jumlah laporan penilaian}$
2. Kantor Pusat DJKN=	$\frac{\text{Indeks pelaksanaan penilaian per laporan penilaian di seluruh Kanwil dan KPKNL}}{\text{Jumlah laporan penilaian}} \times \text{Jumlah laporan penilaian}$
3. Kanwil DJKN=	$\frac{\text{Indeks pelaksanaan penilaian per laporan penilaian di wilayah kerjanya}}{\text{Jumlah laporan penilaian}} \times \text{Jumlah laporan penilaian}$

Adapun *trajectory* IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian adalah sebagai berikut.

DJKN	Layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien							Pol/KP
	4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/
Realisasi	95,5	113,33	113,33	105	105	102,22	102,22	AVG
Capaian	127,3%	151,1%	151,1%	140,0%	140,0%	136,3%	136,3%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75			100%		102
2023	70			100%		96
2022						
2021						
2020						

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian dimaksud yang berupa *extra effort* penyelesaian layanan penilaian yang tepat waktu dengan persentase penyelesaiannya

102,22% di tahun 2024 sehingga IKU tersebut memiliki capaian di atas target yang sudah ditetapkan. Namun masih terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu terbatasnya SDM yang dimiliki KPKNL Jayapura yaitu hanya terdapat satu penilai pemerintah ahli pertama yang menyebabkan penyelesaian pelayanan penilaian dilakukan dengan *extra effort*. Adapun rencana aksi pencapaian IKU ini adalah melaksanakan penyelesaian layanan penilaian sesuai dengan SOP.

#### 5. Sasaran strategis 5: penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki tiga IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	162,15	162
2	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100	129	129
3	indeks pelaksanaan inventarisasi bmn <i>idle</i>	100	100	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

##### 1) Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2024 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum

bersertipikat (termasuk yang berstatus bersertipikat lainnya), dengan *output* sertipikat hak pakai (SHP), atau peta bidang tanah (PBT), atau pemblokiran, atau *input* data pada aplikasi Sentuh Tanahku, atau produk lainnya, atau *update* data pada master aset SIMAN dan validasi pada fitur validasi sertipikasi tanah (Valserah).

IKU persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan memiliki formula perhitungan capaian yaitu:

$$K1 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg disertipikatkan kategori K1}}{\sum \text{target kategori K1}} \times 100\%$$

$$K2 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg terbit PBT kategori K2}}{\sum \text{target kategori K2}} \times 100\%$$

$$K3 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg dilakukan pemblokiran/input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku kategori K3}}{\sum \text{target kategori K3}} \times 100\%$$

$$K4 : \frac{\sum \text{bidang tanah yg di update \& validasi}}{\sum \text{target kategori K4}} \times 100\%$$

$$\text{Formula Total Capaian} : \frac{\sum \text{bidang tanah capaian K1+K2 + K3 + K4}}{\sum \text{target bidang tanah K1+K2 + K3 + K4}} \times 100\%$$

Keterangan:  
 K1 : Output berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP)  
 K2 : Output berupa Peta Bidang Tanah (PBT)  
 K3 : Output berupa Pemblokiran/Input data pada Aplikasi Sentuh Tanahku/Produk Lainnya  
 K4 : Output berupa update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah)

Adapun *trajectory* IKU persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan yaitu sebagai berikut.

DJKN	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5a-CP Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	100	100	Max/
Realisasi	8,88	53,50	53,50	142,06	142,06	162,15	162,15	TLK
Capaian	44,4%	133,8%	133,8%	236,8%	236,8%	162,1%	162,1%	
Nilai Kinerja	44,4	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%		100%	100%		162%
2023			100%	100%		106%
2022	100%		100%			117,24%
2021	100%		100%			103%
2020	100%		100%			103%

Sejalan dengan ketercapaian IKU, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan dimaksud yang berupa *extra effort* sehingga IKU tersebut memiliki capaian diatas target yang sudah ditetapkan, yaitu:

- a) Melakukan koordinasi dan verifikasi atas target sertipikasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja terkait
- b) Melakukan rapat koordinasi atas penyelesaian target K1 dengan masing-masing kantor pertanahan dan satuan kerja terkait.
- c) Melakukan monitoring rutin melalui pelaksanaan rapat dimasing-masing daerah bersama kantor pertanahan, instansi terkait, dan pemerintah daerah
- d) Menyisir data BMN yang menjadi potensi pencapaian K4 dengan melaksanakan *updating* data di SIMAN dan validasi valserah
- e) Melakukan pendampingan *one on one* untuk penyelesaian target K3 melalui deniliasi sentuh tanahku

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut.

- a) Masih banyak terdapat tanah yang ternyata masuk kawasan hutan, bersengketa, dikuasai, dan/atau tumpang tindih sehingga belum dapat diterbitkan sertipikat
- b) Banyak satuan kerja yang masing-masing belum memahami akun mitra dan tata cara deliniasi sentuh tanahku

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a) Terus melakukan koordinasi dan monitoring terhadap penyelesaian target sertifikasi BMN berupa tanah
- b) Menyelaraskan antara target pada kantor pertanahan, KPKNL, serta satuan kerja, khususnya terkait adanya anggaran pensertipikatan
- c) Terus melakukan sosialisasi dan pendampingan *one on one* dalam rangka penyelesaian target sertifikasi

## 2) Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh PB/KPB dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. IKU Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) memiliki formula perhitungan

capaian yaitu sebagai berikut.

Komponen	Formula	Satuan
Komponen A =	(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya / Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)	NUP
Komponen B =	(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker / Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)	Paket
Capaian = (Komponen A x 80%) + (Komponen B x 20%)		

Adapun *trajectory* IKU persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) yaitu sebagai berikut.

T/R	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10,00	32,00	32,00	80,00	80,00	100,00	100,00	Max/
Realisasi	14,39	67,09	67,09	111,64	111,64	128,99	128,99	TLK
Capaian	144%	210%	210%	140%	140%	129%	129%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%					129%
2023	100%					127%
2022	100%					120%
2021	100%					122%
2020	100%					117%

Target IKU Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Melakukan pendataan atas BMN yang belum dilakukan pelaksanaan evaluasi kinerja asetnya
- Melakukan survei lapangan atas kebutuhan data pengisian evaluasi kinerja aset
- Melakukan monitoring atas permintaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil penghitungan evaluasi kinerja aset

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu dalam pelaksanaan penyelesaian evaluasi kinerja BMN, secara umum berjalan dengan lancar, kendala hanya pada proses tindak lanjut hasil rekomendasi oleh satuan kerja. Namun seluruhnya atas rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura, yaitu melakukan pendataan dan inventarisasi atas BMN yang belum dilakukan perhitungan evaluasi kinerjanya untuk kebutuhan data tahun berikutnya.

### 3) Indeks pelaksanaan inventarisasi bmn *idle*

Barang milik negara (BMN) eks BMN *idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga (BMN *idle*), yang telah diserahkan kepada pengelola barang berdasarkan berita acara serah terima.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Selanjutnya, inventarisasi BMN eks BMN *idle*, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis inventarisasi BMN *idle* di pengelola barang, merupakan kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan terhadap hasil pendataan BMN eks BMN *idle* guna menghasilkan daftar barang pengelola yang akuntabel dan akurat. Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh BMN eks BMN *idle* yang tercatat pada daftar barang pengelola. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN *idle* yang dicatat dalam daftar barang pengelola sekaligus melakukan pengkinian data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini atau termuktahir, baik yang berada dalam penguasaan pengelola barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN *idle* yang akuntabel.

Data yang digunakan sebagai *input* pelaksanaan kegiatan inventarisasi di tahun 2024 adalah daftar barang pengelola *unaudited* per 31 Desember 2023 dan kegiatan inventarisasi dilaksanakan terhadap seluruh BMN eks BMN *idle* yang terdaftar.

IKU Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN *idle* memiliki formula perhitungan capaian yaitu sebagai berikut.

Parameter diukur berdasarkan dua aspek, yaitu:

- 1) Kemajuan kegiatan
- 2) Kecepatan pelaporan

**Perhitungan tingkat kemajuan kegiatan berdasarkan hasil reviu/validasi dari unit di atasnya dengan indeksasi sebagai berikut:**

A. KPKNL :

Kegiatan	Indeks
Pengumpulan dokumen sumber	25
Persiapan inventarisasi	35
Pelaksanaan Inventarisasi	55
Pelaporan Inventarisasi	80
Tindak Lanjut	100

Adapun *trajectory* IKU Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN *idle* yaitu sebagai berikut.

DJKN	Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5C-N Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN <i>idle</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	25	55	55	88	88	100	100	Max/
Realisasi	25	55	55	88	88	100	100	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Target IKU pelaksanaan inventarisasi BMN *idle* berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Telah melakukan tahanan persiapan inventarisasi, baik mulai pembentukan tim, rapat koordinasi, serta penyiapan kertas kerja dan rencana aksi
- b) Melakukan pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan hasil inventarisasi.
- c) Melakukan monitoring atas tindak lanjut optimalisasi pemanfaatan BMN eks BMN *idle*

Secara umum penyelesaian IKU dapat berjalan dengan baik dan tidak dapat kendala yang signifikan, namun dalam hal proses inventarisasi masih perlu digencarkan terkait adanya aset-aset yang terindikasi *idle* untuk dilakukan klarifikasi oleh satuan kerja maupun penelitian oleh KPKNL.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a) Melakukan monitoring atas hasil inventarisasi terhadap BMN eks BMN *idle* dan
- b) Melakukan koordinasi terhadap tindak lanjut atas optimalisasi BMN eks BMN *idle* yang umumnya atas tindak lanjutnya masa berlakunya akan berakhir

#### 6. Sasaran strategis 6: Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki dua IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	0	-1	150%
2	Persentase produktivitas lelang	89	130,04	146,12

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

##### 1) Persentase saldo berkas kasus piutang negara

IKU persentase saldo BKPN menggambarkan piutang negara yang telah diserahkan dan diurus oleh PUPN dapat diselesaikan atau telah optimal pengurusan berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 *uncties* PP Nomor 28 Tahun 2022 jjs. PMK 240/PMK.06/2016, dan penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh kementerian negara/lembaga berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020, serta penyelesaian BKPN yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN telah dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah berdasarkan PMK 137/PMK.06/2022. Piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus

secara optimal berdampak pada penurunan saldo BKPN baik yang dikelola oleh PUPN maupun K/L/Pemda.

*Output* piutang negara yang telah diselesaikan dan telah dikelola/diurus secara optimal oleh PUPN, K/L dan pemda yang berdampak pada penurunan saldo BKPN dan sebagai kriteria capaian IKU berupa:

- a) BKPN lunas (SPPNL);
- b) BKPN penarikan (SPPNS);
- c) BKPN dikembalikan (SKPPN);
- d) BKPN piutang negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT);
- e) Koreksi data (BKPN lunas/penarikan/dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- f) BKPN pernyataan piutang negara telah optimal (PPNTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- g) BKPN pernyataan piutang daerah telah optimal (PPDTO) terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya; dan
- h) telah di *update* dan *upload* dokumen pada aplikasi focusPN, selanjutnya dilakukan *review* oleh Kanwil DJKN dan divalidasi oleh KP DJKN (Direktorat PKKN).

IKU persentase saldo BKPN memiliki formulasi sebagai berikut.

Percepatan penyelesaian saldo BKPN dan validitas data piutang negara pada aplikasi FocusPN serta konsolidasi data penyelesaian piutang dengan kualifikasi macet pada K/L/Pemda yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN namun telah dikelola secara optimal

Adapun *trajectory* IKU indeks pelaksanaan inventarisasi bmn *idle* yaitu sebagai berikut.

DJKN	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							Pol/KP
	6a-N persentase saldo bkpn							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	
<b>Target</b>	100	100	100	100	100	0	0	Min/
<b>Realisasi</b>	100	100	100	100	100	0	0	TLK
<b>Capaian</b>	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	120,0%	120,0%	
<b>Nilai Kinerja</b>	100	100	100	100	100	120	120	

Berkas kasus piutang negara KPKNL Jayapura dengan target yaitu penyelesaian 2 BKPN dapat terselesaikan melebihi target yaitu 3 BKPN.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
<b>2024</b>	0%		100%	100%		0%
<b>2023</b>	100%		100%	100%		120%
<b>2022</b>	100%		100%	100%		120,00%
<b>2021</b>	100%		100%	100%		103%
<b>2020</b>	100%		100%	100%		115%

Target IKU persentase saldo berkas kasus piutang negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Pelaksanaan penagihan secara langsung;
- b) Negosiasi pembayaran dengan para penanggung hutang;
- c) Monitoring angsuran debitur;
- d) Sosialisasi dan koordinasi terkait program keringanan utang;
- e) Sosialisasi dan koordinasi terkait ketentuan pengelolaan piutang negara.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut.

- a) Jumlah berkas kasus piutang negara dan saldo outstanding piutang negara yang relatif sedikit;
- b) Keterbatasan kemampuan para penanggung hutang dalam melakukan pembayaran;
- c) Kurang kooperatifnya para penanggung hutang untuk melakukan pembayaran

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a) Pelaksanaan penagihan secara langsung;
- b) Monitoring angsuran penanggung utang;
- c) Sosialisasi dan penggalan potensi pengurusan piutang negara;
- d) Penerbitan surat penerimaan pengurusan piutang negara baru;
- e) Peningkatan upaya penagihan terhadap penanggung hutang.

## 2) Persentase produktivitas lelang

IKU ini mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis Lelang.

Formulasi dalam perhitungan IKU yaitu sebagai berikut.

$$\left( \left( \frac{\sum (\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang})}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \times 40\% \right) + \left( \left( \frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \times 60\% \right) \right) \times \frac{\text{Jumlah realisasi lot lelang laku per jenis lelang}}{\text{Jumlah lot lelang per jenis lelang}} \times 100\%$$

Adapun *trajectory* setiap triwulan sebagai berikut.

DJKN	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif							
	6a-N Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30	45	45	60	60	89	89	Max/
Realisasi	61	63	63	108	108	130	130	TLK
Capaian	203,3%	140,0%	140,0%	180,0%	180,0%	146,1%	146,1%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89%		34%	36%		130%
2023	80%		34%	36%		125%
2022	36%		34%			139,44%
2021	35%		34%			43%
2020	34%		34%	32%		36,95%

Target IKU persentase produktivitas lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Rapat pembahasan lelang barang rampasan bersama Kejaksaan Tinggi Papua,

Oditurat Militer, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua

- b) Membuat *MoU* dengan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan akan diikuti dengan pemerintah kabupaten lainnya
- c) Proses percepatan SKPT *online* melalui akun mitra BPN
- d) Penggalian potensi lelang aset Pemerintah Provinsi Papua
- e) Koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua menindaklanjuti hasil audit aset pemda
- f) Koordinasi penyelesaian barang rampasan

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya sebagai berikut.

- a) Capaian Pegadaian masih rendah
- b) Lelang BMD belum optimal, terhambat birokrasi dan lambatnya proses permohonan penilaian dan lelang
- c) Lelang barang rampasan negara pada kejaksan belum optimal karena terhambat proses penilaian dan tidak lengkapnya dokumen persyaratan (putusan pengadilan)
- d) Permasalahan SKPT untuk lelang UUHT

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a) Koordinasi penyelesaian barang rampasan
- b) Koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua menindaklanjuti hasil audit aset pemerintah daerah
- c) Monitoring dan evaluasi bersama perbankan di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
- d) Penggalian potensi lelang

## **7. Sasaran strategis 7: pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional**

Nilai kekayaan negara yang akuntabel adalah nilai kekayaan negara yang dapat

dipertanggungjawabkan, dipahami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan secara maksimal untuk pengambilan keputusan. Nilai yang dihasilkan diharapkan memenuhi kriteria akuntabel di dalam proses operasionalnya sehingga pihak internal dan pihak eksternal dapat menilai dan melihat kinerja organisasi tersebut.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki satu IKU yaitu persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16%	0,09%	199,44%

### 1) IKU persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan mengukur deviasi dari nilai hasil penilaian dalam penentuan tarif pemanfaatan dan nilai limit penjualan. IKU ini diformulasikan dengan formula sebagai berikut.

Formula:
$40\% \left( \frac{A1-B1}{B1} \right) + 60\% \left( \frac{A2-B2}{B2} \right)$
A1 = Nilai pemanfaatan yang disampaikan dalam laporan penilaian
B1 = Nilai pemanfaatan yang digunakan dalam SK persetujuan pengelolaan
A2 = Nilai penghapusan yang disampaikan dalam laporan penilaian
B2 = Nilai penghapusan yang digunakan dalam SK persetujuan pengelolaan

Adapun *trajectory* triwulanan yaitu sebagai berikut.

DJKN	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-N IKU Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	Min/
Realisasi	0,130	0,160	0,160	0,110	0,110	0,090	0,090	AVG
Capaian	199,2%	199,0%	199,0%	199,3%	199,3%	199,4%	199,4%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16%		26%	26%		0,09%
2023	25%		27%	27%		0,95%
2022	19%		28%	28%		0,45%
2021	22%		29%	29%		0,00%
2020	30%		30%	30%		0,90%

Target IKU persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian dicapai dengan baik dengan *extra effort* dengan hasil penilaian yang telah dilakukan sudah banyak digunakan oleh seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dimana persentase tingkat ketidakgunaannya hanya 0,09% di tahun 2024.

Namun masih terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian, yaitu terbatasnya SDM yang dimiliki KPKNL Jayapura yaitu hanya terdapat satu penilai pemerintah ahli pertama yang menyebabkan penyelesaian pelayanan penilaian dilakukan dengan *extra effort*.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura yaitu akan melaporkan hasil penilaian dan dimana berdasarkan hasil penilaian tersebut digunakan oleh seksi pengelolaan kekayaan negara.

#### 8. Sasaran strategis 8: pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif

Organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (*value chain*) yang selaras dengan tujuan organisasi dan SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai

organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Jayapura memiliki dua IKU seperti pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	120,00	133,3%
2	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	87,05	102,4%

### 1) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Organisasi dan SDM merupakan modal dasar yang dibutuhkan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dengan optimal. Organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif. IKI ini mengukur dua komponen

- a) Kualitas pelaksanaan program kegiatan kebhintalan
- b) Kualitas pemenuhan standar jam pelatihan bagi pegawai

SDM yang berkompentensi tinggi merupakan modal organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Adapun *trajectory* triwulanan yaitu sebagai berikut.

DJKN	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	45	60	60	80	80	90	90	Max/
Realisasi	72,000	96,895	96,895	117,00	117,00	120,00	120,00	TLK
Capaian	160,0%	161,5%	161,5%	146,3%	146,3%	133,3%	133,3%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	90%					120%
2023	100%					120%
2022	100%					120%
2021	100%					120%
2020	100%					120%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada perjanjian kinerja KPKNL Jayapura sejak tahun 2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan.

Target IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai dapat tercapai dengan baik dengan adanya tindakan yang telah dilakukan yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai serta melaksanakan kegiatan kebintalan. Monitoring dilaksanakan untuk memantau kecukupan jumlah Jamlat para pegawai yaitu 40 jam pelatihan.

## 2) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko memiliki dua komponen utama yaitu kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai serta kualitas implementasi manajemen risiko. Penilaian atas kedua komponen ini bertujuan untuk

memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Proses reuiu dilakukan melalui *self assessment* (penilaian mandiri), adapun penetapan hasil penilaian tingkat unit eselon III (KPKNL) dilakukan penilaian oleh manajer kinerja tingkat eselon II (Kanwil DJKN).

Adapun trajectory IKU ini sebagai berikut. DJKN	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Max/
Realisasi	88,11	82,94	82,94	85,92	85,92	87,05	87,05	TLK
Capaian	103,7%	97,6%	97,6%	101,1%	101,1%	102,4%	102,4%	
Nilai Kinerja	103,7	97,6	97,6	101,1	101,1	102,4	102,4	

Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko diperoleh dari:

- a) Nilai indeks pengelolaan kinerja organisasi 81,93
- b) Nilai indeks kualitas manajemen risiko sebesar 94,73

Sehingga diperoleh capaian sebesar 87,05. Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	85					87,05
2023	80					92
2022						
2021						
2020						

Target IKU IKMR belum tercapai dengan optimal karena alasan berikut.

- a) Kurang lengkapnya dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi penilaian pada kertas kerja
- b) Kolaborasi antar pegawai yang masih perlu dioptimalkan lagi.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan penilaian perilaku, DKI, SKP komplemen, IPR serta melaksanakan manajemen kinerja dan risiko sesuai *timeline*. Rencana aksi IKU IKMR untuk ke depannya yaitu meningkatkan ketepatan waktu dokumen yang diperlukan sesuai dengan *timeline* kertas kerja tahun 2025.

#### 9. Sasaran strategis 9: pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pada sasaran strategis ini KPKNL Jayapura mengidentifikasi dua IKU yang masing-masing target dan realisasi dirangkum pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kinerja anggaran	100	120	120,00%
2	Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN	10%	0%	120,00%

### 1) Indeks kinerja Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri atas dua komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu *netto*, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan uang persediaan, perencanaan kas, rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara, pengembalian surat perintah membayar, pengembalian SP2D, pengembalian DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses.

Adapun *trajectory* IKU ini sebagai berikut.

DJKN	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	8b-N Indeks kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	TLK
Capaian	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100		95	100		120
2023	100		95	95		103,78%
2022	95,5%		95	95		96,09%
2021	95,5%		95	95		95,90%
2020	95,0%		95	95		

Target IKU indeks anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan berupa realisasi indeks kinerja anggaran mulai dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Total nilai akhir IKPA Desember 2024 sebesar 98.29 dan melakukan penyusunan RPD triwulanan agar sesuai dengan rencana penyerapan anggaran.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura sebagai berikut.

- a) Melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD serta efisiensi anggaran.
- b) Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan target bulanan/triwulan
- c) Kegiatan optimalisasi capaian *output* masing-masing seksi.
- d) Permintaan data RPD per triwulan pada tahun anggaran 2025.

## 2) Persentase deviasi data PNBPN fungsional DJKN

PNBP fungsional DJKN merupakan jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri atas PNBPN yang berasal dari bea lelang dengan MAP: 425782 (PL I), 425783 (PL II) dan biaya administrasi pengurusan piutang negara (PPN) dengan MAP: 425785.

DJKN	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	8b-N Persentase Deviasi PNBPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	TLK
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Atas capaian IKU diatas diperoleh dari dua komponen, sebagai berikut.

- a) Deviasi data PNBPN lelang: 0%
- b) Deviasi data PNBPN piutang negara: 0%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	10%					0%
2023	15%					0%
2022	10%					0%
2021	12,50%					0%
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada perjanjian kinerja sedangkan pada Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk standar nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam pelaksanaan IKU persentase deviasi data PNBPF fungsional DJKN telah melaksanakan tindakan berupa pelaksanaan monitoring data PNBPF pada aplikasi Dropbox Lelang, FocusPN, dan OM-SPAN.

Mitigasi risiko untuk yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan secara berkala serta monitoring ketepatan waktu penyetoran PNBPF.

#### 10. Sasaran strategis 10: komunikasi publik yang efektif

Pengelolaan informasi publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan

informasi publik. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik tersedia setiap saat secara berkala pada masing-masing *website* untuk menjaga agar informasi publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pada sasaran strategis ini KPKNL Jayapura mengidentifikasi satu IKU yang masing-masing target dan realisasi dirangkum pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	100	120,00%

#### 1) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Pengelolaan informasi publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022.

Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik tersedia setiap saat secara berkala pada masing-masing *website* untuk menjaga agar informasi publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

DJKN	Komunikasi publik yang efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/
Realisasi	107,83	100	100	100	100	100	100	AVG
Capaian	134,8%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	125,0%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80					100
2023	80					100
2022						
2021						
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada perjanjian kinerja. Sedangkan pada Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan. IKU ini telah diampu oleh KPKNL Jayapura sejak tahun 2023 dengan realisasi yang konsisten pada 100.

Target IKU indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) berhasil dicapai dengan baik dengan *extra effort*.

- a) Pemutakhiran informasi publik pada *website* KPKNL Jayapura
- b) Menyampaikan laporan PPID 2023
- c) Monitoring permintaan informasi Publik

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan berupa monitoring dan *update* informasi publik serta pemenuhan pemberian informasi dalam hal terdapat permohonan permintaan informasi yang ditujukan kepada KPKNL berupa melakukan monitoring dan melakukan *update* informasi publik serta pemenuhan pemberian informasi dalam hal terdapat permohonan permintaan informasi yang ditujukan kepada KPKNL Jayapura.

## 11. Sasaran strategis 11: pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Pada sasaran strategis ini KPKNL Jayapura mengidentifikasi satu IKU yang masing-masing target dan realisasi dirangkum pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks efektivitas UKI	82	96,56	117,76%

### 1) Indeks efektivitas UKI

Pengawasan dan pengendalian yang efektif ini merupakan kegiatan penilaian efektivitas unit kepatuhan internal (UKI) pada organisasi. Kriteria penilaian yaitu merupakan hasil penilaian pada kertas kerja penilaian efektivitas unit kepatuhan internal (UKI). Kegiatan pengawasan dan pengendalian yang efektif bertujuan untuk mengetahui efektivitas keberadaan dan dampak dari peran unit kepatuhan internal (UKI) pada tiap organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

DJKN	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11a- N Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max/
Realisasi	5,00	15	15	20	20	97	97	TLK
Capaian	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	117,8%	117,8%	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	117,8	117,8	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), rencana kerja (Renja), dan

standar nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82			80		96.56
2023				80		
2022				75		
2021						
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara perjanjian kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk standar nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

IKU Indeks efektivitas unit kepatuhan internal merupakan IKU *cascading* baru pada perjanjian kinerja direktur jenderal pada tahun 2023. Target IKU indeks efektivitas unit kepatuhan internal (UKI) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan dan sesuai *timeline*
- b) Pengumpulan eviden kegiatan efektivitas UKI

Pencapaian IKU ini masih belum optimal dikarenakan nilai variabel SDM pada Seksi Kepatuhan Internal yang belum sesuai dengan analisis beban kinerja (ABK). Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya yang dilakukan

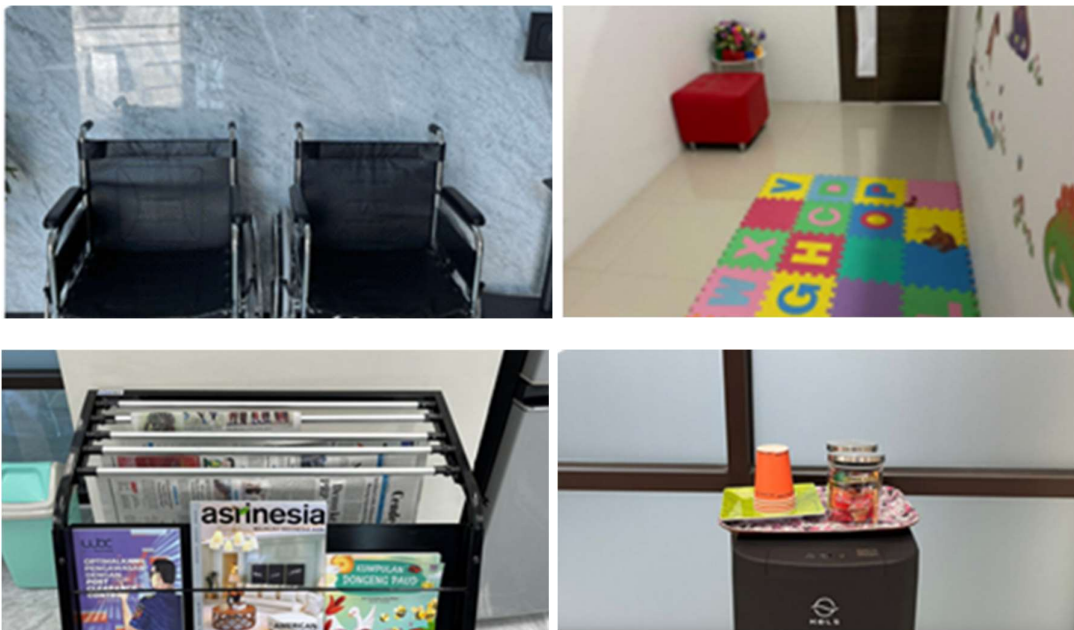
yaitu melaksanakan kegiatan UKI sesuai *timeline* dan mengumpulkan *evidence* di setiap kegiatan. Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Jayapura adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan serta kesesuaian dengan *timeline* dan melakukan pengumpulan *evidence* kegiatan efektivitas UKI.

## B. Kinerja Lainnya

### 1. Parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

GEDSI merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. KPKNL Jayapura sebagai instansi vertikal DJKN, mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara. Oleh karena itu, KPKNL Jayapura berperan penting menerapkan GEDSI dalam memberikan pelayanan yang. Berikut kegiatan dalam pelaksanaan GEDSI yang telah dilaksanakan pada layanan KPKNL Jayapura:

a) Kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) dan fasilitas kelompok rentan



Dalam mendukung kesetaraan gender dalam pelayanan, KPKNL Jayapura menyediakan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan, seperti penyediaan tempat parkir prioritas, penyediaan *guiding block*, jalur *ramp* dan tangga untuk

mempermudah akses bagi kelompok rentan. Selain itu, KPKNL Jayapura juga dilengkapi dengan adanya ruang laktasi bagi para ibu menyusui, *toilet*, area baca, area minum gratis, serta gedung yang dilengkapi sofa jika terdapat antrian pada Area Layanan Terpadu, dan peralatan pendukung berupa kursi roda bagi pengguna layanan yang membutuhkan.

b) Kedai lelang UMKM



Lelang UMKM adalah mekanisme penjualan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara terbuka kepada umum. KPKNL Jayapura telah melaksanakan lelang UMKM yang memiliki dampak positif bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya bagi para pengrajin karya seni khas Papua.

**C. Realisasi Penggunaan Anggaran DIPA tahun 2024**

Realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam bentuk DIPA pada tahun 2024, merupakan pengukuran yang dilakukan atas seberapa besarnya proses penyerapan anggaran yang terjadi pada KPKNL Jayapura selama tahun anggaran. Sedikitnya penyerapan anggaran terjadi pada tahun tersebut, akan berdampak pada pemberian anggaran untuk tahun berikutnya. Adapun tabel penggunaan anggaran DIPA tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel XI**  
**Penggunaan Anggaran DIPA Tahun 2024**

No	Uraian	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0%
2	Belanja Barang	2.424.367.000	2.285.610.188	94,28%

<b>3</b>	Belanja Modal	906.990.000	906.986.000	<b>99,99%</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>3.331.357.000</b>	<b>3.192.596.188</b>	<b>95,83%</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa terdapat penyerapan hampir maksimal dari keseluruhan pengeluaran belanja, baik belanja pegawai, belanja modal, maupun belanja modal pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya maka kami mencoba menguraikan sebagai berikut.

Realisasi anggaran belanja selama tahun 2024 sebesar 95,83% atau Rp3.192.596.188,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp3.331.357.000,00. Secara capaian pada tahun 2024 penyerapan anggaran pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu penyerapan anggaran tahun 2023 adalah sebesar 88,80%.

## BAB IV

### PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jayapura sebagai salah satu unit penyelenggara pemerintahan. Dengan disusunnya LAKIN dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan pada BAB III dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja KPKNL Jayapura secara umum pada Tahun Anggaran 2024 adalah sangat baik. Semua target yang telah ditetapkan berdasarkan indeks kinerja utama (IKU) sesuai kontrak kinerja Kepala Kantor dapat tercapai dengan sangat baik, selain IKU persentase realisasi pokok lelang dan iku persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Adapun nilai kinerja organisasi (NKO) Tahun 2024 tercapai sebesar 108,85%.

Dari data hasil capaian di atas, terdapat beberapa target yang sudah optimal dicapai pada tahun 2024 ini, namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor, yaitu:

1. Belum meluasnya informasi tentang lelang ke masyarakat;
2. Kemampuan satker dalam melakukan penatausahaan BMN masih kurang;
3. Kurangnya penguasaan beberapa satker tentang pengoperasian aplikasi SIMAN Versi 2;
4. Keterbatasan kemampuan para penanggung hutang dalam melakukan pembayaran;
5. Jumlah berkas kasus piutang negara dan saldo *outstanding* piutang negara yang relatif sedikit
6. Wilayah kerja yang luas, sementara transportasi minim;
7. Keterbatasan kemampuan pegawai dalam beracara di pengadilan.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk periode berikutnya, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk mencegah pengulangan masalah-masalah periode ini dan periode sebelumnya pada masa depan, yakni:

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh pihak-pihak terkait;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian pengurusan

- piutang negara, dan lelang;
3. Sosialisasi dan penggalian potensi lelang dan pengurusan piutang negara;
  4. Terus melakukan penggalian potensi atas PNBP aset, baik dari optimalisasi pemanfaatan aset, penjualan BMN rusak berat, maupun pendekatan pada barang-barang rampasan
  5. Melakukan monitoring secara rutin terhadap satuan kerja khususnya yang perlu melakukan tindak lanjut atas sewa dan penjualan BMN
  6. Menugaskan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung kinerja kantor;
  7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan kenyamanan kantor dan Area Pelayanan Terpadu;
  8. Pelaksanaan penagihan secara langsung;
  9. Monitoring angsuran penanggung utang;
  10. Merencanakan pengelolaan anggaran secara baik

Pada tahun 2024 KPKNL Jayapura telah meraih berbagai macam penghargaan di antaranya:

1. Terbaik 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Semester II Tahun 2023 dengan nilai 100 Kategori Satker Kemenkeu (BA 15).
2. KPKNL dengan Produktivitas Lelang Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
3. KPKNL dengan Capaian PNBP Piutang Negara Tertinggi Tahun 2023 Lingkup Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku.
4. Juara 1 *Fashion Show* dalam rangka HORI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Papua
5. Juara 1 *Gaple* dalam rangka HORI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Papua
6. Juara 1 *e-Sport Mobile Legend* dalam rangka HORI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Papua
7. Juara 3 Biliar dalam rangka HORI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretariat

## Perwakilan Kemenkeu Papua

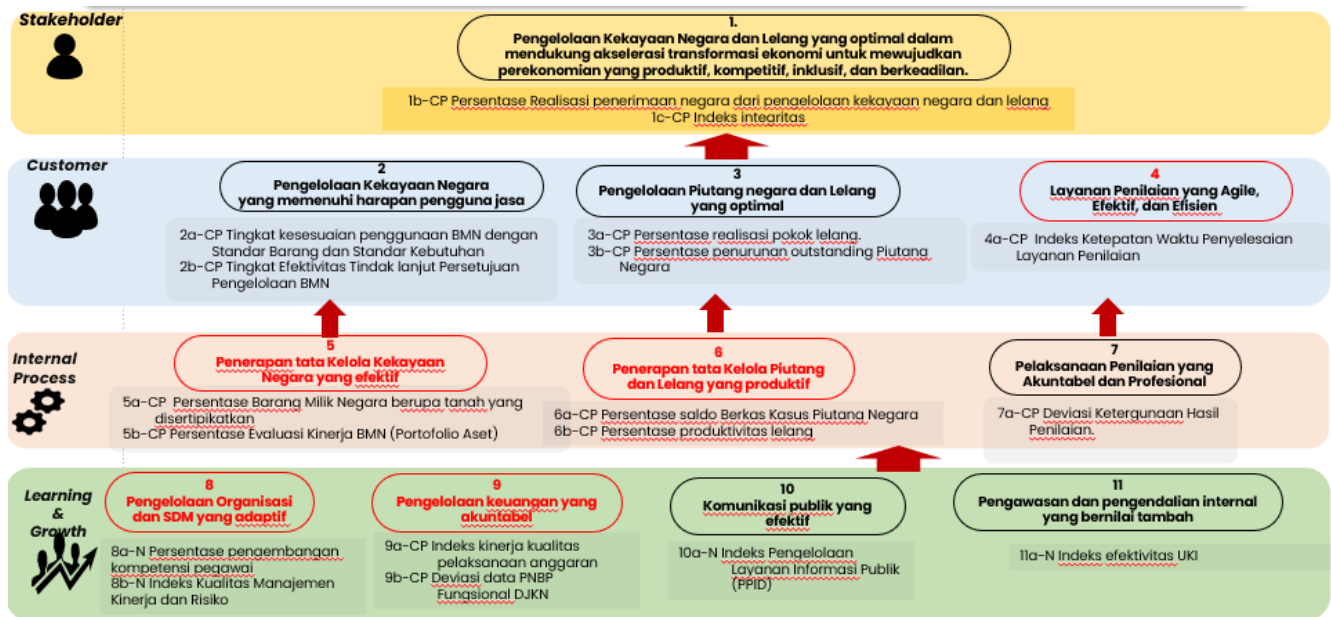
Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini kami mengharapkan agar berguna bagi para *stakeholder*, menjadi dasar acuan dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kinerja tahunan.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-02/WKN.17/2024**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**JAYAPURA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**



# PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

## KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (22,04 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (326,67 M)
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (2,18 M)
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	0% (0 berkas)
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9.		9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11.	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	82

**Program/Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

**Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko**

**Rp943.827.000,00**

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Pengelolaan Aset

Rp68.677.000,00

Rp875.150.000,00

**Dukungan Manajemen**

**Rp2.303.568.000,00**

1. Legislasi dan Litigasi
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

Rp27.168.000,00

Rp2.240.416.000,00

Rp18.136.000,00

Rp17.848.000,00

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jayapura



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dadang Eko Darminto



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG JAYAPURA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan</b>								
	1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>								
	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5 %	71,5%
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5 %	86,5%
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal</b>								
	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4</b>	<b>Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>								
	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif</b>								
	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
<b>6</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif</b>								
	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
	6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>								
	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%



No	SS, IKU		Target						
			Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>8</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif</b>								
	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
	8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
<b>9</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel</b>								
	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
	9b-CP	Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>10</b>	<b>Komunikasi Publik yang Efektif</b>								
	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>11</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah</b>								
	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Jayapura,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dadang Eko Darminto



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif / Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Dashboard SICAKIN	Katalog Layanan KPKNL	Q I : Penyusunan Sistem Sesuai Proses Bisnis Q2: Pengujian <i>Dashboard</i> dan penyempurnaan Q3: Sosialisasi dan Implementasi pada Satuan Kerja Q4: Evaluasi Penggunaan <i>Dashboard</i>	Q1: Susunan Layanan yang akan di tampilkan Q2: <i>Preview</i> tampilan <i>Dashboard</i> Q3: Laporan Kegiatan dan Monitoring Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan	Q1 s.d Q4 Tahun 2024	Seluruh Seksi dan Jabatan Fungsional pada KPKNL Jayapura	-
	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal / Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Sosialisasi Pensertifikatan	Peningkatan Kompetensi SDM mengenai Pengelolaan Keuangan Negara pada Satuan Kerja/Stakeholder	Q1: Pelaksanaan Dialog dengan Stakeholders terkait materi Q2 : Penyusunan Materi dan Narasumber Q3 : Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q1: Daftar Materi yang dibutuhkan Satuan Kerja Q2: Daftar Kurikulum Q3:Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Q4: Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q1 s.d Q4 Tahun 2024	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Jayapura



Ditandatangani Secara Elektronik  
Dadang Eko Darminto



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dadang Eko Darminto	NAMA	Wibawa Pram Sihombing	
NIP	197405111999031001	NIP	197609061999031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jayapura	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	
HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	<i>Penerima Layanan</i>
		Indeks Integritas	89,17	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>



2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	<i>Penerima Layanan</i>
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	<i>Penerima Layanan</i>
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	<i>Penerima Layanan</i>
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	<i>Penerima Layanan</i>
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	<i>Penerima Layanan</i>
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	<i>Proses bisnis</i>
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	<i>Proses bisnis</i>
6	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	0%	<i>Proses bisnis</i>
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	<i>Proses bisnis</i>
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	<i>Proses Bisnis</i>
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
		Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
10	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>



11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas UKI	82	<i>Penguatan Internal atau Anggaran</i>
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik</p>



PERILAKU KERJA

- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Dadang Eko Darminto  
197405111999031001



Ditandatangani secara elektronik

Wibawa Pram Sihombing  
197609061999031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	25 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	86,5%	86,5%	86,5%
5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%



10	Persentase saldo outstanding Berkas Kasus Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
11	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
12	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
13	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
14	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
17	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
18	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
 Dadang Eko Darminto  
 197405111999031001



Ditandatangani secara elektronik  
 Wibawa Pram Sihombing  
 197609061999031001





## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: 02A/WKN.17/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-02/WKN.17/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja		Target	Indikator Kinerja		Target
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	-	-	-	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100

## B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Sebelum									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	1b-CP	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	2b-CP	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5c-N	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	88	88	100	100
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	11a-N	Indeks Efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Menyetujui,  
Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik  
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura



Ditandatangani secara elektronik  
Dadang Eko Darminto



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	-	-	-
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	<i>Penguatan Internal dan Anggaran</i>
Menjadi				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	100	<i>Proses Bisnis</i>
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja anggaran	100	<i>Penguatan Internal dan Anggaran</i>

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17	2	Indeks integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
4	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86,5	86,5	4	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100	8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle	25	55	55	88	88	100	100
13	Persentase Pengembangan	10	60	60	75	75	90	90	14	Persentase Pengembangan	45	60	60	80	80	90	90

	Kompetensi Pegawai									Kompetensi Pegawai							
15	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100	16	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	19	Indeks Efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82

Jakarta, 31 Mei 2024

Pejabat yang dinilai,

Pejabat penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Dadang Eko Darminto



Ditandatangani secara elektronik  
Wibawa Pram Sihombing



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI KEMENTERIAN KEUANGAN  
PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Daniel H.P. Panggabean, S.H., M.M.	NAMA	Wibawa Pram Sihombing
NIP	197806121998031001	NIP	197609061999031001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina, IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jayapura	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
2.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran



3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung kselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5	Penerima Layanan
7.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase realisasi pokok lelang	100	Penerima Layanan
8.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	Penerima Layanan



9.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
10.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	Proses Bisnis
11.	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle	100	Proses Bisnis
13.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	0	Proses Bisnis
14.	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase produktivitas lelang	89	Proses Bisnis
15.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	Proses Bisnis



16.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel. (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Deviasi data PNBPFungsional DJKN	10	Penguatan Internal atau Anggaran

#### B. TAMBAHAN

#### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani</p>



PERILAKU KERJA		
	- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan</p>



PERILAKU KERJA		
		informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawa



Ditandatangani secara elektronik

Daniel H.P. Panggabean  
197806121998031001

31 Mei 2024

Pejabat F



Ditandatangani secara elektronik

Wibawa Pram Sihombing  
197609061999031001





LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 31 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	21 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		80	80	80	80	80	80
2	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)		15	15	20	20	82	82
3	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang		100	100	100	100	100	100
4	Indeks Integritas		20	20	30	30	89,17	89,17
5	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan		50	50	60	60	71,5	71,5
6	Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN		45	45	60	60	86,5	86,5



7	Persentase realisasi pokok lelang		100	100	100	100	100	100
8	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara		100	100	100	100	100	100
9	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian		75	75	75	75	75	75
10	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		40	40	60	60	100	100
11	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		32	32	80	80	100	100
12	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle		55	55	88	88	100	100
13	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara		100	100	100	100	0	0
14	Persentase produktivitas lelang		45	45	60	60	89	89
15	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		16	16	16	16	16	16
16	Persentase pengembangan kompetensi pegawai		60	60	75	75	90	90
17	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko		85	85	85	85	85	85
18	Indeks Kinerja Anggaran		100	100	100	100	100	100
19	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN		10	10	10	10	10	10
KONSEKUENSI								



1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Daniel H.P. Panggabean  
197806121998031001

31 Mei 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Wibawa Pram Sihombing  
197609061999031001





**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

